

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

(PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 71 TAHUN 2022)

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

## KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

Dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam rangka mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 khususnya Misi Keempat "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*".

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 11 Juli 2022

INSPEKTUR DAERAH,

Drs. RIKFDWI WORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730929 199303 1 003







WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renis

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke 2 (dua) dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
  - a. salah 1 (satu) bahan penyusunan Rancangan KUA PPAS, khususnya Program/Kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
  - b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2023, setelah tercantum dalam KUA PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; dan
  - c. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 11 Juli 2022

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI E



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 71 TAHUN 2022</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	48
3.3 Program dan Kegiatan	49
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	62
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah – Inspektorat Daerah Kota Dumai	28
Tabel 2.3	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai	31
Tabel 2.4	Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai	32
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 – Inspektorat Daerah Kota Dumai	39
Tabel 3.1	Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap Terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	47
Tabel 3.2	Kesesuaian Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai	49
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Dumai	50
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 – Inspektorat Daerah Kota Dumai	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
----------	--	---



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

## **BAB I**

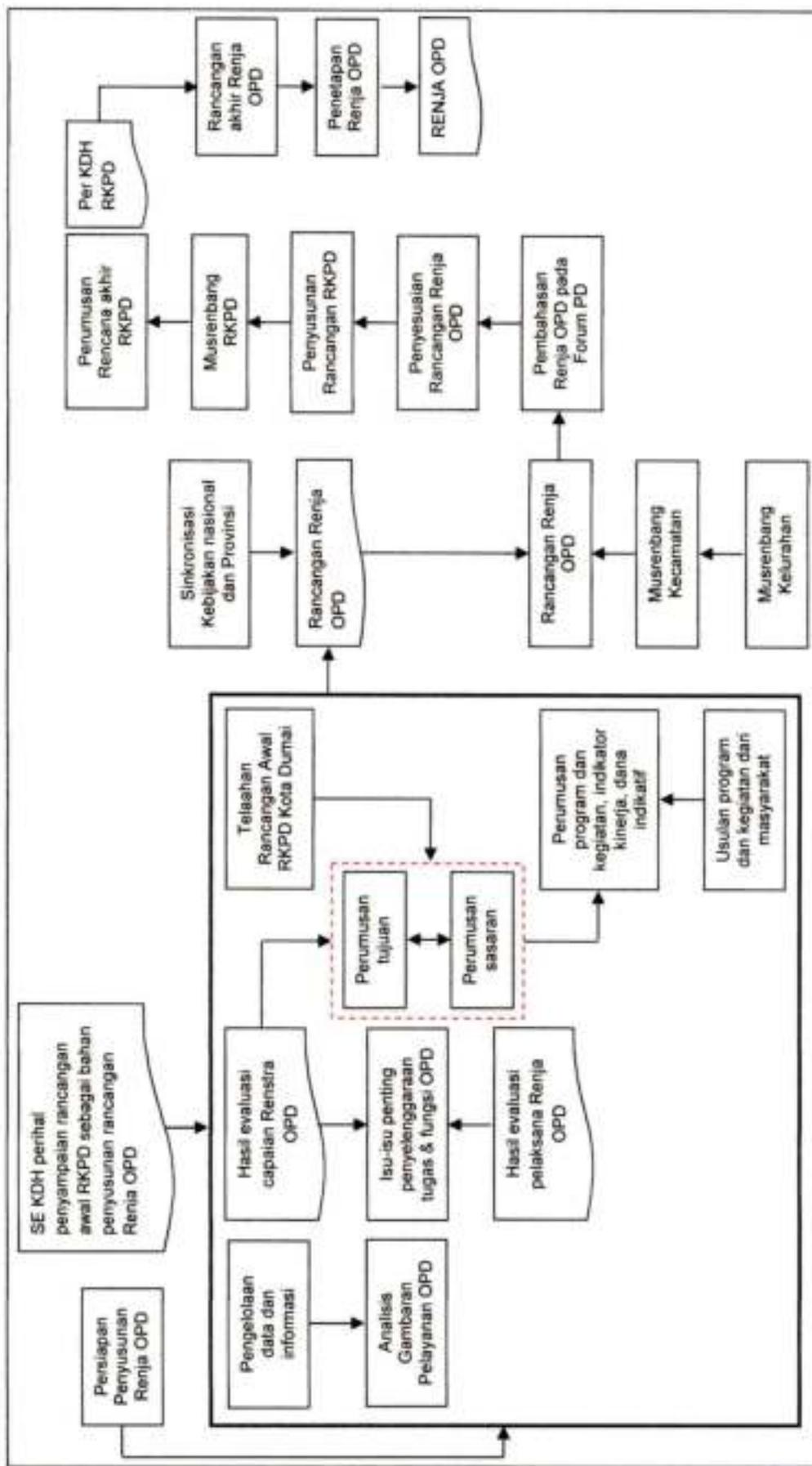
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan merupakan serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Proses/tahapan penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah  
 Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan penyusunan Renja meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu penyusunan rancangan awal Renja ini juga mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru ini diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja ini mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan

Tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah ini merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga Maret kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi rancangan Renja ini dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda, tujuannya untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda. Rancangan Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum tersebut.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD. Rancangan akhir Renja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi selambat-lambatnya selama 2 (dua) minggu dalam rangka menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Rancangan akhir Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan

kembali kepada Kepala Bappeda. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan setelah menerima Surat Wali Kota Dumai Nomor 050/1489/BAPPEDA tanggal 20 Desember 2021 Hal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan awal renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022 di Gedung Sri Bunga Tanjung Kota Dumai. Rancangan awal Renja disempurnakan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah, selanjutnya diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaiannya dengan rancangan awal RKPD. Jika sudah sesuai, maka rancangan awal Renja yang telah disempurnakan tersebut menjadi Rancangan Renja. Selanjutnya rancangan Renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Musrenbang RKPD Kota Dumai yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 di Gedung Sri Bunga Tanjung Kota Dumai. Rancangan Renja disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kota Dumai. Rancangan akhir Renja Tahun 2023 disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Jika tidak terdapat saran dan rekomendasi dari hasil verifikasi, maka rancangan akhir Renja ini ditetapkan menjadi Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini mempedomani: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (3) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026; dan (4) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021. Dalam merumuskan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai, dilakukan telaah terhadap Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau, juga Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka sinkronisasi program pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian target nasional. Renja ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum perumusan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor

- 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kota Dumai tahun 2021 nomor 4 Seri E);
  21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
  22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 8 Seri D); dan
  23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 23 Seri E).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai ini adalah untuk memastikan bahwa Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai ini telah disusun selaras dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2023. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2023, meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, serta keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai dengan dokumen RKPD Kota Dumai tahun 2022, Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, dengan Renja Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Inspektorat Daerah Kota Dumai, kewenangan Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI KOTA DUMAI TAHUN 2020**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Dumai.**

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dan perkiraan capaian Tahun 2022.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Inspektorat Daerah Kota Dumai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai, mencakup permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan (membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan), penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Memuat penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI KOTA DUMAI**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Bagian ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai.**

Bagian ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai.

#### **3.3. Program dan Kegiatan.**

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan, serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan
- Tabel rencana program dan kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

Bab ini melampirkan rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 yang disesuaikan dengan rumusan rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa:

- Catatan penting yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai dilakukan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Pada Tabel 2.1 tersaji rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.1 Realisasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kota Duma

Kode	Uraian Kegiatan/Program/Kelembagaan	Indikator Kinerja Program/Kelembagaan/Subkegiatan	Target Kinerja Program Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program/Kelembagaan/ Subkegiatan Renja Tahun 2022	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana s.d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kelembagaan/ Subkegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	3	3	4	5	6	7	8	9 = (3 + 7 + 8)	10 = (10/14)	
8										
8	UNDUK PENGAWASAN URUSAN PERMINTAAN									
8	01	01								
8	01	01	100%					100%	100%	
8	01	01	100%					100%	100%	
8	01	2.01								
8	01	2.01	12 Dokumen							
8	01	2.01	2 Dokumen							
8	01	2.01	8 Dokumen							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Dokumen							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Dokumen							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Dokumen							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Dokumen							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8	01	2.01	1 Dokumen							
8	01	2.01	4 Laporan							
8										

Kode	Uraian/Isi Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Revisi) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Minuman Kegiatan Subkegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
					Tanggal Berapa Tahun 2021	Realisasi Berapa Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
8 01 01 2.01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen				1 Dokumen	-	-	100%
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Suci Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	14 OrngBln 8 Laporan				14 OrngBln	-	14 OrngBln	100%
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Dag dan Tunjangan ASN	Konfirmasi ASN Jumlah Orang yang Menunggu Dag dan Tunjangan ASN	14 Bulan 212 Orng/Bulan				14 Bulan	-	14 Bulan	100%
8 01 01 2.02 05	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mda Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Mdy Tahun Jumlah Laporan Keuangan Mdy Tahun, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Mda Kualitas Mda Tahun SKPD	1 Laporan 4 Laporan				1 Laporan	-	4 Laporan	8%
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan				-	-	-	-
8 01 01 2.02 08	Penyusunan Laporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Program	1 Laporan				1 Laporan	-	0 Laporan	0%
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Mda Daerah pada Perangkat Daerah	Terminya Pengeluaran Asat Dengan Baik Jumlah laporan inventarisasi barang with asat pada perangkat daerah	8 Laporan				2 Laporan	-	3 Laporan	21%
8 01 01 2.03 06	Penelusuran Barang Mda Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan inventaris barang Mda Daerah Jumlah Laporan Penelusuran Barang Mda Daerah pada SKPD	2 Laporan 4 Laporan				2 Laporan	-	2 Laporan	100%
8 01 01 2.05	Administrasi Akupendapatan Perangkat Daerah	Jumlah Bdr Bdr Jumlah ASN yang meninggal Sagat/Sehat	58 Bdr 940 Orng				58 Bdr	-	80 Bdr	100%
8 01 01 2.05 02	Pengakuan Pukuan Cms Secara Akut Keseluruhan	Menggunakan kinerja ASN untuk peng la kmdr Jumlah Pukuan Pukuan Cms secara Akut Keseluruhan	56 Bdr 4 paket				50 Bdr	-	0 Bdr	0%
8 01 01 2.05 09	Penelitian dan Pembuatan Program Berorientasi Tugas dan Fungsi	Jumlah Program Berorientasi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Penelitian dan Pengujian	140 Orng				0 Orng	-	0 Orng	-
8 01 01 2.05 10	Tercapainya Perubahan Perundang-Undangan	Jumlah Orng yang Mengikuti Disiplin Perubahan Perundang-Undangan	800 Orng				0 Orng	-	0 Orng	-

Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rincian) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Subkegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Penilaian Realisasi Capaian Target Rencana s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
					Target Rincih Tahun 2021	Realisasi Rincih Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
8 01 01 2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Barang Pagar Hobis	12 Bulan 4 Laporan		12 Bulan	-	-	100%	
8 01 01 2.06 01	Perencanaan Komposisi Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Administrasi Urusan Perangkat Daerah	12 Bulan		12 Bulan	-	-	100%	
8 01 01 2.06 02	Perencanaan Komposisi Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Urusan Perangkat Daerah	8 paket		8 paket	-	-	-	
8 01 01 2.06 03	Perencanaan peralihan dan pengalihan kantor	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	12 Bulan		12 Bulan	-	-	100%	
8 01 01 2.06 04	Perencanaan peralihan dan pengalihan kantor	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	4 paket		4 paket	-	-	-	
8 01 01 2.06 05	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	8 paket		8 paket	-	-	-	
8 01 01 2.06 06	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	12 Bulan		12 Bulan	-	-	100%	
8 01 01 2.06 07	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	8 paket		8 paket	-	-	-	
8 01 01 2.06 08	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	12 Bulan		12 Bulan	-	-	100%	
8 01 01 2.06 09	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	8 paket		8 paket	-	-	-	
8 01 01 2.06 10	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	12 Bulan		12 Bulan	-	-	100%	
8 01 01 2.06 11	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	4 Dokumen		4 Dokumen	-	-	-	
8 01 01 2.06 12	Perencanaan peralihan surat hingga pengalihan	Jumlah Peralihan dan Pengalihan Kantor	95 Bulan 173 Laporan		95 Bulan 173 Laporan	-	-	100%	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Inventarisir Daerah Kota Dumai	12 Bulan		12 Bulan	-	-	100%	
8 01 01 2.07 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	381 unit		381 unit	-	-	-	
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 unit		1 unit	-	-	0%	
8 01 01 2.07 03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	4 unit		4 unit	-	-	-	
8 01 01 2.07 04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100 unit		100 unit	-	-	0%	
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	200 unit		200 unit	-	-	-	

Kode	Uraian/Isi/Detail Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain			Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja s.d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Perawatan dan Mesin Laundry	Jumlah Pengadaan Perawatan dan Mesin Kantor Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Laundry yang disediakan	20 unit 150 unit	-	-	-	20 unit	Realisasi Capaian Program/Kegiatan Subkegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2023) 20 unit	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%) 100%
6.01.01.2.07.07	Pengadaan Ases, Tenda, Lemari	Jumlah Pengadaan Ases Kantor Jumlah Unit Ases Tak Berwujud yang disediakan	4 unit 1 unit	-	-	-	4 unit	4 unit 1 unit	0% 0%
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Sempurna Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1,5 1 unit	-	-	-	1,5	1,5	0%
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	0%
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Sempurna Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	-	-	-	3 unit	3 unit	0%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perencing Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakan rigit Jumlah laporan penyelesaian jasa perencing pelaksanaan urusan pemerintahan	11 Laporan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menerima	Jumlah Bulan Surat Terhimpun	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	0%
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pemeliharaan Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	18 Laporan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Mesin, Motor, Kendaraan	Perawatan Peralatan 1) Jumlah Jasa Perawatan Kantor 2) Jumlah Jasa Perawatan Kantor 3) Jumlah Jasa Perawatan Kantor 4) Jumlah Jasa Perawatan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan Urusan Kantor yang disediakan	2 unit 210 Orang Bulan	-	-	-	2 unit	2 unit	0%
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Ases Inspektoral Daerah Kota Dumai Jumlah Barang Milik Perseorangan Daerah yang disediakan Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Kota Dumai yang disediakan yang dipelihara dan dibayarkan paguhanya	220 Laporan	-	-	-	216 Orang Bulan	216 Orang Bulan	100%
6.01.01.2.09	Pembinaan Bidang Mills Daerah Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ases Inspektoral Daerah Kota Dumai Jumlah Barang Milik Perseorangan Daerah yang disediakan Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Kota Dumai yang disediakan yang dipelihara dan dibayarkan paguhanya	12 Bulan 913 unit 7 unit 12 unit	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Perawatan, Sempurna Perawatan, dan Pajuk Pemeliharaan Dinas atau Kantor dan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Kota Dumai yang disediakan yang dipelihara dan dibayarkan paguhanya	7 unit 12 unit	-	-	-	7 unit	7 unit	100%

Kode	Uraian/Isi/Deskripsi Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (fungsia) Tahun 2022	Revisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Subkegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program Kegiatan/Subkegiatan Rincia Tahun 2022	Pekayaan Realisasi Capaian Target Secara s.d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
					TARGET HASIL TAHUN 2021	REALISASI HASIL TAHUN 2021	TUGAS REALISASI (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan Subkegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Secara (%)
8 01 01 2 00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Boga Pemeliharaan, Pagar, dan Pelebaran Kandang Deras Operasional dan Lapangan	Jumlah Kandang Deras Operasional yang Dipelihara, Jumlah Kandang Deras Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagar dan Pelebarannya	4 unit				4 unit	0 unit	0%	
8 01 01 2 00 06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Kantor	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	100%	
8 01 01 2 00 07	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	425 unit				-	-	-	
8 01 01 2 00 07	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Asat Tetap Kantor	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	100%	
8 01 01 2 00 09	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemeliharaan yang Diambatkan	1,5				1,5	1,5	100%	
8 01 01 2 00 11	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Siap pakai	4 unit				-	-	-	
8 01 01 2 00 11	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tahun dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Siap pakai	1 unit				0 unit	0 unit	-	
8 01 02	PROGRAM KENYATAAN PENGUSAHA	Pemetaan Penyelenggaraan Pengawasan	100%				100%	100%	100%	
8 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100% 371 Laporan				100%	100%	100%	
8 01 02 2 01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan	70 LHP				70 LHP	70 LHP	100%	
8 01 02 2 01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan	48 Laporan				-	-	-	
8 01 02 2 01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	144 Laporan				0 Laporan	0 Laporan	-	
8 01 02 2 01 04	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Revisi dan Evaluasi Dokumen	14 Dokumen				14 Dokumen	14 Dokumen	100%	
8 01 02 2 01 05	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Revisi Laporan Kinerja	158 Laporan				-	-	-	
8 01 02 2 01 06	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Triaklan Penyusunan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Kota Dumai	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	100%	
8 01 02 2 01 07	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Revisi Laporan Kinerja	4 Laporan				-	-	-	



Kode	Uraian/Isiung Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Kinerja Program (Berapa) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Akurasi Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain (Tahun 2021)			Tingkat Realisasi (N)	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (N)
					Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (N)		
8 01 03 2 02 01	Pencapaian dan Asesmen Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asesmen Urusan Pemerintahan Daerah	12 peringkat daerah						
8 01 03 2 02 02	Pencapaian, Asesmen, Verifikasi dan Pemantauan Reformasi Struktural	Pencapaian Pemulihan Mandiri yang dilaksanakan Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asesmen, verifikasi, dan pemantauan Reformasi Struktural	1 peringkat daerah 40 peringkat daerah				100%	100%	
8 01 03 2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan	3 Dokumen 3 kegiatan				3 Dokumen	100%	
8 01 03 2 02 04	Pencapaian, Asesmen dan Verifikasi Pelaksanaan Integrasi	Jumlah Dokumen Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asesmen dan verifikasi pelaksanaan integrasi	3 Dokumen 0 peringkat daerah				3 Dokumen	100%	

Pada Tabel 2.1 diatas khususnya pada kolom 3, dapat kita lihat bahwa adanya penyesuaian terhadap indikator kinerja kegiatan/subkegiatan yang tertuang di dalam Renja maupun DPA Tahun 2022 dengan indikator kinerja kegiatan/subkegiatan yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini terjadi karena indikator kinerja kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan kinerja mulai tahun 2023 ditetapkan setelah tersusunnya APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pada periodesasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, sehingga pada Tabel 2.1 dapat kita lihat bahwa kolom 5 s.d. kolom 8 tidak dilakukan evaluasi karena hasil evaluasinya tidak berpengaruh terhadap perkiraan realisasi capaian target Renstra s.d. tahun 2022 pada periodesasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Meskipun demikian, realisasi program/kegiatan pada tahun 2021 dijadikan sebagai *baseline* data dalam menetapkan target di setiap tahun perencanaan pada periodesasi 2022-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021 sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tahun 2022 merupakan tahun pertama pada periodesasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, oleh karena itu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan

tahun 2021 tidak mempunyai pengaruh terhadap target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026, namun realisasi program/kegiatan pada tahun 2021 tersebut dijadikan sebagai *baseline* data dalam menetapkan target di setiap tahun perencanaan pada perodesasi 2022-2026. Seluruh program/kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tertuang di dalam Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022. Tetapi tidak seluruh program/kegiatan tersebut tertuang pada DPA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022.

Beberapa kegiatan/subkegiatan yang diprediksi tidak mencapai target yang direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah di tahun 2022 karena keterbatasan anggaran pada DPA Tahun 2022 diantaranya:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
  - 1) Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - 2) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
  - 3) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
  - 4) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD; dan
  - 5) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
  - 1) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
  - 2) Subkegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
  - 1) Subkegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - 2) Subkegiatan pengadaan mebel;

- 3) Subkegiatan pengadaan aset tetap lainnya;
- 4) Subkegiatan pengadaan aset tak berwujud; dan
- 5) Subkegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1) Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat; dan
  - 2) Subkegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Subkegiatan kerja sama pengawasan internal.
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Subkegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang di dalam dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 maupun DPA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 diprediksi akan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pada perodesasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, sehingga diprediksi tidak ada program/kegiatan/subkegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026 karena keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan/subkegiatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Ada beberapa faktor yang diprediksi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya terjadinya kesalahan dalam menetapkan target kinerja pada saat penyusunan dokumen Renstra, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan, dan/atau alasan teknis lainnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Ketersediaan SDM dan anggaran yang terbatas sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra. Oleh karena itu, ketersediaan data dukung yang valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk menyusun target pada dokumen rencana agar tepat dalam menentukan indikator, baik target maupun pendanaan indikatifnya. Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan karena kesalahan dalam menetapkan target kinerja maupun pagu indikatif sebaiknya dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan perubahan dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator-indikator kinerja tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Level Maturlas SPIP	Level		2	3	3	3	150%	100%	100%	100%	
2.	Level Kapabilitas APIP	Level		2	3	3	3	150%	100%	100%	100%	
3.	Nilai SAKIP OPD	Nilai		B	A	A	A	107%	78%	78%	89%	
4.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI	%		75	90	95	95	113%	94,8%	90,0%	90,5%	
5.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP	%		75	90	95	95	112%	93%	89%	91%	
6.	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBSM)	%		80	90	100	100	21%	19%	28%	39%	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Level Maturitas SPIP.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Unsur-unsur SPIP antara lain:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur-unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi antara lain:

1. Mekanisme penilaian, terdiri dari:
  - a. Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
  - b. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Fokus penilaian, pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi, mencakup unsur-unsur berikut:
  - a. SPIP;
  - b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
  - c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
  - d. Kapabilitas APIP, akan dilakukan penilaian tersendiri.
3. Komponen penilaian, terdiri dari:
  - a. Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
  - b. Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
  - c. Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Periode yang dinilai dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan, berdasarkan:
  - a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
  - b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
  - c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai dan hasil evaluasi oleh BPKP Provinsi Riau, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Dumai telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP "Level 3 (Terdefinisi)" seperti nilai yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai

Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi oleh BPKP	Naik / (Turun)
Maturitas penyelenggaraan SPIP	3,847	3,204	(0,644)
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,025	3,081	(0,944)
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,706	(0,294)

Dari tabel 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Riau atas hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Dumai adalah sebesar 3,204 (level 3). Realisasi capaian level maturitas SPIP Kota Dumai Tahun 2021 ini melebihi target level maturitas yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Level 2) dengan tingkat capaian sebesar 150%.

b) Level Kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

1. Mekanisme Penilaian, meliputi:
  - a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
  - c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Komponen Penilaian, terdiri atas:
  - a. Dukungan pengawasan;
  - b. Aktivitas pengawasan; dan
  - c. Kualitas pengawasan.
3. Aspek Penilaian, terdiri atas:
  - a. Kebijakan;
  - b. Implementasi; dan
  - c. Hasil.
4. Periode Penilaian:
  - a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
  - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai dan hasil *quality assurance* (QA) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada "Level 3" dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai

Elemen	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil QA oleh BPKP
Peran dan layanan	Level 3	Level 3
Manajemen sumber daya manusia	Level 3	Level 3
Praktik professional	Level 3	Level 3
Akuntabilitas dan manajemen kinerja	Level 3	Level 3
Budaya dan hubungan organisasi	Level 3	Level 3
Struktur tata kelola	Level 3	Level 3

Dari tabel 2.4 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil QA BPKP Provinsi Riau atas hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai, nilai kapabilitas APIP Kota Dumai berada pada level 3. Realisasi capaian level kapabilitas APIP Kota Dumai Tahun 2021 ini melebihi target level kapabilitas APIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Level 2) dengan tingkat capaian sebesar 150%.

c) Nilai SAKIP OPD.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi belanja peralatan dan perlengkapan penunjang layanan}}{\text{Total kebutuhan peralatan dan perlengkapan penunjang layanan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator "Nilai SAKIP OPD" tahun 2021 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai adalah 70 dengan kategori nilai B. Pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai, sebanyak 6 (enam) OPD mendapatkan kategori nilai A, 24 (dua puluh empat) OPD mendapatkan kategori nilai BB, dan sisanya mendapatkan kategori nilai B dengan nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 75,09 atau dengan kategori nilai BB. Berdasarkan data tersebut, maka nilai rata-rata SAKIP OPD tahun 2021 adalah sebesar 75,09 dengan kategori nilai BB, artinya realisasi indikator ini di tahun 2021 melebihi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 107%.

d) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK - RI yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK - RI}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK-RI" tahun 2021 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 75%. Sampai dengan tahun 2021, jumlah rekomendasi BPK-RI adalah sebanyak 1.087 temuan. Dari total 1.087 temuan tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 925 temuan, sebanyak 136 temuan sudah

ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 13 temuan belum ditindaklanjuti dan 13 temuan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI tahun 2021 adalah sebesar 85,1%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 113%.

e) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi APIP}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP" tahun 2021 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 75%. Sampai dengan tahun 2021, jumlah rekomendasi APIP adalah sebanyak 4.459 temuan. Dari total 4.459 temuan tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 3.733 temuan, sebanyak 197 temuan sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 529 temuan belum ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2021 adalah sebesar 83,72%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 112%.

f) Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang diusulkan berpredikat WBK dan WBBM s.d. tahun n}}{\text{Total OPD yang menjadi target berpredikat WBK dan WBBM}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator "Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)" tahun 2021 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 80%. Sampai dengan tahun 2021, terdapat 3 (tiga) OPD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM dari total 18 (delapan belas) OPD yang menjadi target berpredikat WBK dan WBBM pada tahun 2026.

Berdasarkan kedua data tersebut, maka persentase wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2021 adalah sebesar 16,7%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 21%.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan unsur pengawasan diantaranya:

1. Belum memadainya sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. Belum optimalnya penegakan integritas;
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;
8. Kurangnya koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesegera mungkin;
9. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap program prioritas/strategis;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan; dan
11. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan profesional berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah Kota Dumai menyelenggarakan 6 (enam) fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*". Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Peluang:
  - a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
  - b. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
  - c. Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan disiplin ilmu yang beragam, sehingga bisa saling mensinergikan sudut pandang terhadap permasalahan audit;
  - d. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh standar audit dan kode etik serta peraturan/kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan;

- e. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh pendidikan teknis dan non teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan;
  - f. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
  - g. Peran APIP semakin dibutuhkan sebagai mitra dalam meningkatkan kinerja, khususnya sebagai kontrol dan evaluasi terhadap segala proses kerja yang dilakukan;
  - h. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasi, *tools* dan metode pengawasan membantu pengembangan serta pemutakhiran program pengawasan sehingga dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran; dan
  - i. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Tantangan
- a. Alokasi sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan objek/entitas yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif;
  - b. Belum optimalnya perangkat Teknologi Informasi serta sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
  - c. Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP;
  - d. Perlunya peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM APIP;
  - e. Optimalisasi pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;
  - f. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
  - g. Aktivitas pengawasan oleh APIP melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* diarahkan untuk perbaikan GRC termasuk memanage risiko dan memastikan pengendalian telah ada, dilaksanakan, dan efektif.
  - h. Praktik pengawasan harus sesuai standar profesi;
  - i. Berkembangnya paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah "***Peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penguatan peran dan kapasitas APIP***" agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.5. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan pada rancangan awal RKPD adalah sebanyak 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) subkegiatan, sesuai dengan hasil analisis kebutuhan mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) subkegiatan;
2. Pagu indikatif Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah berjumlah Rp. 15.950.554.036,- berdasarkan hasil analisis kebutuhan total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2023 berjumlah Rp. 19.683.516.036,-, mengalami kenaikan sebesar 23,4 %.

TABEL 2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Keabsahan				Capaian		
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kekurangan Dana (Rp.)	Capaian
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				15.850.554.836					18.843.516.036	
INSPEKTORAT DAERAH										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100%	15.850.554.836	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				18.843.516.036	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dukungan Untuk Penjangkauan Pelaksanaan Urutan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.493.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Dokumen	135.900.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.870.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	28.672.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	75.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Laporan	10.320.828.836	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2 Laporan	10.350.828.836	
Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	10.320.828.836	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	10.320.828.836	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	1 Laporan	10.000.000	
Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	228.602.000	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	300.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 Laporan	228.602.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1 Laporan	300.000.000	
Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	228.602.000	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	300.000.000	

Rancangan Awal RPJPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah PNS yang meningkat keaktifannya	35 Orang	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah PNS yang meningkat keaktifannya	35 Orang	500.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengakui Peningkatan dan Penguatan	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengakui Peningkatan dan Penguatan	0 Orang	-		Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengakui Peningkatan dan Penguatan	35 Orang	500.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	837.863.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.139.888.999	
Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didistribusikan	2 Paket	19.161.600	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didistribusikan	2 Paket	25.000.000	
Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Didistribusikan	2 Paket	183.665.500	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Didistribusikan	2 Paket	300.000.000	
Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didistribusikan	0 Paket	-	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didistribusikan	2 Paket	500.000.000	
Persediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribusikan	2 Paket	98.360.000	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribusikan	2 Paket	180.000.000	
Persediaan barang cetakan dan percetakan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan percetakan yang Didistribusikan	2 Paket	120.168.000	Persediaan barang cetakan dan percetakan	Kota Dumai	Jumlah Paket barang Cetakan dan percetakan yang Didistribusikan	2 Paket	130.000.000	
Persediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didistribusikan	1 Dokumen	4.988.000	Persediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didistribusikan	1 Dokumen	4.988.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	30 Laporan	405.570.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	30 Laporan	500.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	32 unit	145.160.866	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	49 unit	1.387.181.806	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	1 unit	367.181.000	
Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Didistribusikan	0 unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Didistribusikan	15 unit	119.000.000	
Pengadaan Perabot dan Meubelair	Kota Dumai	Jumlah Unit Perabot dan Meubelair yang Didistribusikan	32 unit	145.160.800	Pengadaan Perabot dan Meubelair	Kota Dumai	Jumlah Unit Perabot dan Meubelair yang Didistribusikan	32 unit	350.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Didistribusikan	0 unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Didistribusikan	0 unit	-	
Pengadaan Aset Tak Berwujud yang Didistribusikan	Kota Dumai	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Didistribusikan	0 unit	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud yang Didistribusikan	Kota Dumai	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Didistribusikan	0 unit	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	0 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	1 unit	500.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	0 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	0 unit	-	

Rancangan Awal RPJPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Papir Induktif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	2 Laporan	373.034.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	2 Laporan	373.034.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang telah disediakan	1 Laporan	22.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang telah disediakan	1 Laporan	22.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	351.034.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	351.034.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Dumai	Jumlah barang milik perangkat daerah yang dipelihara	67 Unit	841.432.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah barang milik perangkat daerah yang dipelihara	98 Unit	817.356.000
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan Perawatannya	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dipelihara Pakajnya	7 Unit	280.012.800	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Perawatannya	9 Unit	527.400.000
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Laba-laba	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dipelihara Pajak dan Perawatannya	0 Unit	-	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Laba-laba	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	9 Unit	243.680.000
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Listrik	Kota Dumai	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	24.020.000	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Listrik	Kota Dumai	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	86.276.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	26.640.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	500.700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	350.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>1.998.288.200</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>3.425.000.000</b>
Penyenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	20 Laporan	1.471.277.000	Penyenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	37 Laporan	2.825.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	880.250.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	1.700.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Laporan	-	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	37 Laporan	400.000.000
Revisi Laporan Kinerja	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	20 Laporan	141.961.400	Revisi Laporan Kinerja	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	20 Laporan	175.000.000
Revisi Laporan Keuangan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	37 Laporan	110.532.600	Revisi Laporan Keuangan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	37 Laporan	190.000.000
Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Dumai	Jumlah Kelempakan Pengawasan Internal	0 Kelempakan	-	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Dumai	Jumlah Kelempakan Pengawasan Internal	0 Kelempakan	-
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tidak Pelaksanaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pelaksanaan APSP	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tidak Pelaksanaan APSP	1 dokumen	308.533.200	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pelaksanaan APSP	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tidak Pelaksanaan APSP	1 dokumen	400.000.000

Rancangan Awal RPFD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Paga Indirect (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	527.811.100	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	600.000.000
Peningkatan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah yang Diteliti	1 Laporan	275.543.100	Peningkatan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah yang Diteliti	1 Laporan	300.000.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	250.068.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	300.000.000
<b>PROGRAM PERUBAHAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>1.160.750.000</b>	<b>PROGRAM PERUBAHAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>1.255.028.000</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2 Rekomendasi	609.896.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2 Rekomendasi	255.028.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diteliti	1 Rekomendasi	155.028.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diteliti	1 Rekomendasi	155.028.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Diteliti	1 Rekomendasi	454.868.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Diteliti	1 Rekomendasi	100.000.000
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan</b>	<b>3 Kali</b>	<b>500.854.000</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan</b>	<b>3 Kali</b>	<b>1.000.000.000</b>
Pendampingan dan Asistensi Urusan P	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	0 Perangkat Daerah	-	Pendampingan dan Asistensi Urusan P	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	4 Perangkat Daerah	200.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	4 Perangkat Daerah	124.500.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	4 Perangkat Daerah	200.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kinerja	Kota Dumai	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kinerja	3 Kegiatan	188.040.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kinerja	Kota Dumai	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kinerja	3 Kegiatan	350.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	3 Perangkat Daerah	228.252.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	3 Perangkat Daerah	250.000.000

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan penelaahan dari usulan masyarakat atau kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang ditujukan kepada perangkat daerah khususnya ketika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD. Penyampaian usulan masyarakat dalam rangka penyusunan RKPD 2023 yang disampaikan pada saat Rembuk RT, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat (pokok pikiran DPRD), Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, sampai dengan Musrenbang RKPD di Tingkat Kota tidak ada yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2045. Visi pada RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi “Nawacita Kedua” antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

RPJMN 2024-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 penguatan proses transformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang ditetapkan diantaranya:

1. Pembangunan sumber daya manusia;  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur;  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan

wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi;  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi;  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi.  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Indonesia 2045 menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung terwujudnya Misi kedelapan RPJMN Tahun 2020-2024 "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya". Serta mendukung pelaksanaan agenda

pembangunan ketujuh RPJMN Tahun 2020-2024 “*Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik*” melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, dan peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional. Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah terlihat dari skor indeks RB “B ke atas”, baru mencapai 11,22% sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, perilaku koruptif masih terjadi. Hal ini ditandai dengan masih adanya Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan isu strategis selama 5 (lima) tahun ke depan dari sisi akuntabilitas yaitu data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Untuk itu perlu percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan *money follow program* sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung terwujudnya sasaran "Penegakan Hukum Nasional yang mantap" dan "Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola" pada Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik. Adapun indikator dan target nasional yang ditetapkan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap Terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator	Baseline 2018/2019	Target 2024
Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,70	4,14
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indeks RB $\geq$ Baik	11,22	85
	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Skor SAKIP $\geq$ B	46,85	80

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang direncanakan terkait sasaran yang tersaji pada Tabel 3.1 diantaranya:

1. Penegakan hukum nasional, dengan arah kebijakan penguatan sistem anti korupsi, yang akan diwujudkan melalui strategi berikut:
  - a) Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - b) Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

2. Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan arah kebijakan Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, yang akan diwujudkan melalui strategi perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai, sebagaimana yang tertuang di dalam Bab II subbab 2.3, maka dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai "***Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu***" sekaligus pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 khususnya Misi keempat "***Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik***", maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirumuskan Tujuan Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu "***Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah***", dengan Sasaran "***Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah***".

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Kesesuaian Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu	<u>Misi-4</u> Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	<u>Tujuan PD</u> Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.  <u>Indikator:</u> - Level Maturitas SPIP - Level Kapabilitas APIP	<u>Sasaran PD</u> Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  <u>Indikator:</u> - Nilai SAKIP OPD - Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI - Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP - Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai Tahun 2021-2026, pencapaian SDG's, serta upaya pengentasan kemiskinan dan stunting, maka dirumuskan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.3. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Program – 12 (dua belas) Kegiatan – 42 (empat puluh dua) Subkegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 19.816.335.036,- bersumber dari APBD. Pagu indikatif, maupun jenis kegiatan/subkegiatan yang tersaji pada tabel 3.3 tidak sesuai dengan pagu maupun jenis kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada dokumen rancangan awal RKPD tahun 2023. Hal ini terjadi karena pagu indikatif pada rancangan awal RKPD tersebut tidak bisa mengakomodir seluruh kegiatan/subkegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Inspektoral Daerah Kota Dumai

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6 01	INSPEKTORAT DAERAH			19.816.335.036			25.537.002.842
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	15.216.307.036			18.384.890.000
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	267.819.000			550.000.000
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	APBD		50.000.000
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	APBD		50.000.000
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	APBD		50.000.000
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000	APBD		50.000.000
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	207.819.000	APBD		250.000.000
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	10.350.928.836			12.418.890.000
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	10.320.928.836	APBD		12.318.890.000
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	APBD		50.000.000

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Praktoran Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	APBD	1 Laporan	50.000.000	
6 01 01 2 03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milk daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	300.000.000		1 Laporan	300.000.000	
6 01 03 2 03 06	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	1 Laporan	300.000.000	APBD	1 Laporan	300.000.000	
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	235 Orang	460.000.000		53 Orang	600.000.000	
6 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	480.000.000	APBD	35 Orang	500.000.000	
6 01 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	100.000.000	APBD	200 Orang	100.000.000	
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.218.988.000		1 Laporan	1.673.000.000	
6 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	25.000.000	APBD	2 paket	50.000.000	
6 01 01 2 06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	230.000.000	APBD	1 paket	318.000.000	
6 01 01 2 06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebutuhan kantor	2 paket	150.000.000	APBD	2 paket	180.000.000	
6 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	2 paket	180.000.000	APBD	2 paket	175.000.000	
6 01 01 2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 paket	130.000.000	APBD	2 paket	180.000.000	
6 01 01 2 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	4.988.000	APBD	1 Dokumen	50.000.000	
6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 Laporan	500.000.000	APBD	40 Laporan	720.000.000	

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan	38 unit	1.387.181.000		101 unit	1.272.000.000
6 01 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	367.181.000	APBD	1 unit	368.000.000
6 01 01 2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 unit	170.000.000	APBD	70 unit	330.000.000
6 01 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 unit	350.000.000	APBD	30 unit	574.000.000
6 01 01 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	350.000.000	APBD	0 unit	-
6 01 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	APBD	0 unit	-
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan	2 Laporan	373.034.209		2 Laporan	547.000.000
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	22.000.000	APBD	1 Laporan	160.000.000
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	351.034.200	APBD	1 Laporan	447.000.000
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasaan yang dipelihara	63 unit	817.356.000		114 unit	1.024.000.000
6 01 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	3 unit	137.400.000	APBD	3 unit	138.200.000
6 01 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	243.680.000	APBD	10 unit	355.800.000
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	86.276.000	APBD	100 unit	180.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Majo Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbarui/rehabilitasi	1 unit	350.000.000		1 unit	350.000.000
6 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	3.345.000.000		100%	4.252.110.842
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	93 Laporan	2.745.000.000		93 Laporan	3.052.110.842
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah	12 Laporan	670.000.000	APBD	12 Laporan	727.110.842
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36 Laporan	1.200.000.000	APBD	36 Laporan	1.250.000.000
6 01 02 2.01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan	42 Laporan	375.000.000	APBD	42 Laporan	405.000.000
6 01 02 2.01 04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	100.000.000	APBD	1 Laporan	120.000.000
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	2 dokumen	400.000.000	APBD	2 dokumen	550.000.000
6 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>17 laporan</b>	<b>600.000.000</b>		<b>19 laporan</b>	<b>1.200.000.000</b>
6 01 02 2.02 01	Perencanaan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	300.000.000	APBD	1 laporan	550.000.000
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	16 laporan	300.000.000	APBD	18 laporan	650.000.000
6 01 03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	1.255.028.000		100%	2.900.000.000
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	2 rekomendasi	255.028.000		2 rekomendasi	650.000.000
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	155.028.000	APBD	1 rekomendasi	250.000.000
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	100.000.000	APBD	1 rekomendasi	300.000.000

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	15 perangkat daerah	1.000.000.000		15 perangkat daerah	2.250.000.000
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3 perangkat daerah	200.000.000	APBD	3 perangkat daerah	550.000.000
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	200.000.000	APBD	10 perangkat daerah	500.000.000
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan	350.000.000	APBD	3 kegiatan	600.000.000
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Kegiatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Perangkat Integritas	2 perangkat daerah	250.000.000	APBD	2 perangkat daerah	600.000.000



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*" pada, serta mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pada Tabel 4.1 berikut terlampir Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah disesuaikan dengan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023.



Kode	Uraian/Detail Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Rencana Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Materi Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Gedung/Ruang	Target Capaian Kinerja	
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Tidak Ulang	Target
6.01.01.2.02.01	Penyediaan alat dan perlengkapan ASN			Jumlah barang yang diserahkan dipukul (Rp) (SPPD)	Kota Dumai	53 Orang/bulan			53 Orang/bulan		12.110.000.000
6.01.01.2.02.02	Kontribusi dan Perawatan Laporan Keuangan Asli Tahun SPPD dan Laporan Hasil Kinerja			Jumlah Laporan Keuangan Asli Tahun SPPD dan Laporan Hasil Kinerja Perseorangan Laporan Keuangan Asli Tahun SPPD	Kota Dumai	1 Laporan			1 Laporan		30.000.000
6.01.01.2.02.03	Kontribusi dan Perawatan Laporan Keuangan (Bulan/Triwulan) Semesteran SPPD			Jumlah Laporan Keuangan Substansi Tahunan/ Semesteran SPPD dan Laporan dan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Substansi/ Tahunan/ Semesteran SPPD	Kota Dumai	1 Laporan			1 Laporan		30.000.000
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan inventaris barang milik daerah			1 Laporan			1 Laporan		300.000.000
6.01.01.2.03.01	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SPPD			Jumlah laporan perencanaan	Kota Dumai	1 Laporan			1 Laporan		300.000.000
6.01.01.2.03.02	Administrasi Manajemen Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mendaftar			200 Orang			200 Orang		600.000.000
6.01.01.2.03.03	Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan Tiga dan Lima			Jumlah Pegawai berstatus Tiga dan Lima yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Dumai	30 Orang			30 Orang		600.000.000
6.01.01.2.03.04	Standarisasi Perilaku Perilaku/Manajemen			Jumlah Orang yang Mengikuti Standarisasi Perilaku/Perilaku/Umbaran	Kota Dumai	200 Orang			200 Orang		100.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Urusan Perangkat Daerah			1 Laporan			1 Laporan		1.873.000.000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Laporan Statistik/Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Paket Penyusunan Laporan/Statistik/Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	2 Paket			2 Paket		30.000.000

Kode	Uraian/Detail Urutan Pemertintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prediksi Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kumulatif Dana / Paga Indikat (Rp.)
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Tidak Ular	Target	
6.01.01.2.06	02 Penyelenggaraan urusan dan pengabdian masyarakat		Jumlah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Kota Dumai	1 paket	230.000.000	A/RSD	1 paket		218.000.000		
6.01.01.2.06	03 Penyelenggaraan urusan umum		Jumlah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Kota Dumai	2 paket	750.000.000	A/RSD	2 paket		180.000.000		
6.01.01.2.06	04 Penyelenggaraan urusan umum		Jumlah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Kota Dumai	2 paket	900.000.000	A/RSD	2 paket		150.000.000		
6.01.01.2.06	05 Penyelenggaraan urusan umum		Jumlah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Kota Dumai	2 paket	1.000.000.000	A/RSD	2 paket		180.000.000		
6.01.01.2.06	06 Penyelenggaraan urusan umum		Jumlah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Kota Dumai	1 Dokumen	4.000.000	A/RSD	1 Dokumen		80.000.000		
6.01.01.2.06	08 Penyelenggaraan urusan umum		Jumlah pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan	Kota Dumai	30 Laporan	600.000.000	A/RSD	30 Laporan		120.000.000		
6.01.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pengelolaan barang milik daerah perseorangan pelaksanaan urusan pemerintahan		38 unit	1.387.181.000		38 unit		1.275.000.000		
6.01.01.2.07	02 Pengelolaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan, Operasi dan Pemeliharaan	Kota Dumai	1 unit	367.181.000	A/RSD	1 unit		366.000.000		
6.01.01.2.07	03 Pengelolaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan, Operasi dan Pemeliharaan	Kota Dumai	10 unit	170.000.000	A/RSD	10 unit		280.000.000		
6.01.01.2.07	04 Pengelolaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan, Operasi dan Pemeliharaan	Kota Dumai	20 unit	360.000.000	A/RSD	20 unit		314.000.000		
6.01.01.2.07	05 Pengelolaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan, Operasi dan Pemeliharaan	Kota Dumai	1 unit	300.000.000	A/RSD	1 unit		-		
6.01.01.2.07	06 Pengelolaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan, Operasi dan Pemeliharaan	Kota Dumai	1 unit	150.000.000	A/RSD	1 unit		-		
6.01.01.2.08	Pengelolaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan jasa perseorangan pelaksanaan urusan pemerintahan		2 Laporan	373.004.200		2 Laporan		347.000.000		

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Capaian Peringkat	Tingkat Capaian Kinerja
6.01.01.2.06	02 Penyelenggaraan Kemitraan Sumber Daya Air dan Lahan			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kemitraan Sumber Daya Air dan Lahan yang diterbitkan	Kota Dumai		1 Laporan	22.100.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
6.01.01.2.06	04 Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kurat			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kurat yang diterbitkan	Kota Dumai		1 Laporan	201.004.200	APBD		1 Laporan	442.000.000
6.01.01.2.06	Pembinaan Bawang Merah Daerah Puncung Utara Pemerintahan Daerah		Jumlah bawang merah yang diterbitkan			63 unit		817.104.000			174 unit	1.024.000.000
6.01.01.2.06	01 Penyelenggaraan Pelayanan, Bina Perencanaan, Bina Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Dinas			Jumlah Mendirikan Perangka Dinas dan Kurat	Kota Dumai		3 unit	137.400.000	APBD		3 unit	138.000.000
6.01.01.2.06	02 Penyelenggaraan Pelayanan, Bina Perencanaan, Bina Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Dinas			Jumlah Mendirikan Dinas Operasional dan Laporan yang diterbitkan	Kota Dumai		9 unit	343.000.000	APBD		9 unit	360.000.000
6.01.01.2.06	06 Penyelenggaraan Perbaikan dan Pemeliharaan			Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan	Kota Dumai		01 unit	96.275.000	APBD		01 unit	100.000.000
6.01.01.2.06	08 Penyelenggaraan Perbaikan dan Pemeliharaan			Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan	Kota Dumai		1 unit	300.000.000	APBD		1 unit	300.000.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERANGKATAN Penyelenggaraan Pemerintahan					100%		5.345.000.000			100%	4.202.110.840
6.01.02.2.01	01 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			83 Laporan		2.740.000.000			83 Laporan	3.000.110.840
6.01.02.2.01	01 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dinas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai		12 Laporan	670.000.000	APBD		12 Laporan	727.110.840
6.01.02.2.01	02 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dinas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai		70 Laporan	1.070.000.000	APBD		70 Laporan	1.273.000.000



Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Rencana Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Meluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
											Tingkat Uluh	Target	
6 01 03 2 02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Penuguh Daerah yang dilakukan pendampingan tipe asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai			3 penuguh daerah	280.000.000	4780		3 penuguh daerah	850.000.000
6 01 03 2 02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pembinaan Mutu dan Kualitas			Jumlah Penuguh Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan pembinaan Mutu dan Kualitas	Kota Dumai			11 penuguh daerah	280.000.000	4780		11 penuguh daerah	850.000.000
6 01 03 2 02 03	Konfirmasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan			Jumlah Kegiatan Konfirmasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kota Dumai			3 kegiatan	800.000.000	4780		3 kegiatan	900.000.000
6 01 03 2 02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengadaan Kegiatan			Jumlah Penuguh Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Pengadaan Kegiatan	Kota Dumai			2 penuguh daerah	280.000.000	4780		2 penuguh daerah	600.000.000



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**BAB V**

**PENUTUP**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai. Dokumen Renja tahun 2023 ini disusun bersamaan dengan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pasca disyahkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Menteri Dalam Negeri. Sumber pendanaan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2023 bersumber dari APBD.

Dokumen Renja ini disusun mempedomani dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dan memperhatikan hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dokumen Renja ini mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 Wali Kota Dumai yang merupakan tahun kedua pada RPJMD Kota Dumai perodesasi 2021-2026. Tahun 2023 merupakan "Tahap Pengembangan" pada RPJMD 2021-2026 dengan Tema Pembangunan "Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana , potensi, sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk memperkuat Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu". Terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, diantaranya:

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan;
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung pelaksanaan prioritas kelima pembangunan Kota Dumai Tahun 2023 "Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah", khususnya pada strategi "Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah", dengan arah kebijakan "Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal". Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, telah direncanakan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 3 dan Bab 4 dokumen Renja ini, apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dalam pelaksanaannya lebih diutamakan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai, pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama pada Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta pencapaian prioritas nasional.

Tata cara penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bab II Bagian Ketujuh "Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah".

Setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dokumen rencana tahunan ini dijadikan acuan oleh Inspektur Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Dumai, 11 Juli 2022



Drs. RIKI DWI WORO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730929 199303 1 003



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

# LAMPIRAN

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2023

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2023.
- (4) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

- b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2023.
- c. pedoman penyusunan RKA-PD.

#### Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. BAB VII : Penutup.

#### Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 5 Juli 2022

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 23 SERI E

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023**

Dasar Operasional : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPERFORBAT

Suku Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPERFORBAT

Kode	Unit Organisasi / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Masa Realisasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Praktis Mula Rencana Tahun 2024		
			Kualitas Sub Kegiatan	Kuantitas Sub Kegiatan	Masa Realisasi Sub Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja		Tingkat Uraian	Target	Kebijakan Dasar/ Pagar Indikatif (Rp.)
<b>UNDIR PENGAMALAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>													
<b>PROGRAM PELUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>													
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
6.01.01	Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Anggaran Daerah	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Desember	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	21.417.900.842	
6.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan (MPTD)	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6 Desember	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	10.000.000	
6.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan (MPTD)	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6 Desember	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	10.000.000	
6.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (MPTD)	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (MPTD)	1 Laporan	1 Desember	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	10.000.000	
6.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6 Desember	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	200.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
6.01.01	Penyediaan Cadangan Tunjangan ASN	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	31 Desember	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	12.114.300.000	
6.01.01	Keuntungan dan Penyediaan Laporan Keuangan (MPTD) Tahun 2023	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	10.000.000	
6.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (MPTD) Semester I/2023	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (MPTD) dan Laporan Keuangan Perencanaan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	50.000.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>													
6.01.01	Perencanaan Barang Milik Daerah pada MPTD	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada MPTD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	300.000.000	
6.01.01	Perbaikan dan Pemeliharaan Program Berstruktur Tegal dan Fungsi	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	Jumlah Alokasi yang menyangkut kegunaannya	11 Orang	31 Desember	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragun Besar	100 %	100 %	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Revisitas pemungutan urusan pemerintahan urusan inspektoral	100 %	500.000.000	

Dasar Operasional : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPERFORBAT

Suku Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPERFORBAT

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.61.0.00.00.01.0000 WAPRES/DAKAT

Sub Unit Organisasi : 6.61.0.00.0.00.01.0000 WAPRES/DAKAT

Kode	Unitary/ Bidang Utama/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Bencana Tahun 2023			Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Head Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Head Kegiatan	Pagi Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja Tingkat Ura	Keluaran Dana/ Page Indikator (Rp.)
6.01.01.2.05.19	Standarisasi Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan perundang-undangan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Undang yang mengakhiri Standarisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASK yang mempunyai kompetensi	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	200 Undang	215 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	100.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.215.988.000			1.873.000.000
6.01.01.2.06.01	Perbaikan Kinerja Instansi, SOP/Prosedur, Anggaran Kerja	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Paket Empangan, Manual, SOP/Prosedur, Anggaran Kerja yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	2 Paket	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	50.000.000
6.01.01.2.06.02	Perbaikan Kualitas dan Peningkatan Kinerja	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Paket Peraturan dan Peringatan Kerja yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	1 Paket	1 Laporan	230.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	318.000.000
6.01.01.2.06.03	Perbaikan Kualitas Fungsi	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Paket Peraturan Kerja yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	2 Paket	1 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	190.000.000
6.01.01.2.06.04	Perbaikan Sistem Logistik	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Paket Buku Logistik Kerja yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	2 Paket	1 Laporan	180.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	270.000.000
6.01.01.2.06.05	Perbaikan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	2 Paket	1 Laporan	310.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	400.000.000
6.01.01.2.06.06	Perbaikan Sistem Sukan dan Kegiatan Peningkatan Warga	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Dokumen Buku Baku dan Peraturan Pengundang-Undangan yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	1 Dokumen	1 Laporan	4.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	50.000.000
6.01.01.2.06.08	Perangkat Keras, Koordinasi dan Komunikasi	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	80 Laporan	1 Laporan	500.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	720.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang MIB Daerah Peningkatan Urutan Pemenuhan Daerah								1.187.181.000			1.270.000.000
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Tanah dan Operasional dan Lain-lain	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Undi Kemudahan Operasi dan Lain-lain yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	1 Undi	88 Undi	807.181.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	886.000.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	15 Undi	88 Undi	110.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	130.000.000
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Asuransi dan Lain-lain	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Undi Peraturan dan Anggaran yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	20 Undi	88 Undi	300.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	374.000.000
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kerja dan Bangunan Lain-lain	Penyusunan perundang-undangan pemerintahan yang memperhatikan unsur pengkaji legalitas	Jumlah Undi Gedung Kerja dan Bangunan Lain-lain yang Disiapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Rajang Besar	100%	1 Undi	88 Undi	300.000.000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	100%	374.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 (KAPROKORAB)  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 (KSPROKORAB)

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktis Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Page Indikat (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
											Tidak Ujar	Target	
6.01.01.2.07.10	Perencanaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Output Pemertanian dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	1 Unit	38 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	100 %	0
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Perbaikan Jasa Persewaan Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>379.894.200</b>		<b>147.000.000</b>				
6.01.01.2.08.02	Perbaikan Jasa Konstruksi Tambak Sayur Air Laut	Perbaikan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Jumlah Laporan Perbaikan Jasa Konstruksi Tambak Sayur Air Laut yang disediakan	Jumlah Laporan Perbaikan Jasa penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	1 Laporan	2 Laporan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perbaikan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	100 %	100.000.000
6.01.01.2.08.04	Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perbaikan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Jumlah Laporan Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan perbaikan jasa penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	1 Laporan	2 Laporan	65.014.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perbaikan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	100 %	447.000.000
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Penelitian dan Pengumpulan Bahan MBR Daerah Penyempurnaan Pemertanian Daerah</b>						<b>873.354.000</b>		<b>1.024.000.000</b>				
6.01.01.2.09.01	Pengambilan data pemertanian, MBR pemertanian, dan RPH dan Pengumpulan Bahan MBR dan Sarana dan Prasarana dan Sarana	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Jumlah Kembaran Rancangan Skema dan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dan ditanggung Kabupaten	Jumlah listing with pengumpul data pemertanian atau penggantian yang diperlukan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	1 unit	63 Unit	127.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	100 %	138.000.000
6.01.01.2.09.02	Pengambilan data pemertanian, MBR pemertanian, dan RPH dan Pengumpulan Bahan MBR dan Sarana dan Prasarana dan Sarana	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Jumlah Kembaran Rancangan Operasional dan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dan ditanggung Kabupaten	Jumlah listing with pengumpul data pemertanian atau penggantian yang diperlukan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	8 Unit	63 Unit	241.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	100 %	333.000.000
6.01.01.2.09.06	Penelitian dan Pengumpulan Bahan MBR Lainnya	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Jumlah Penelitian dan MBR Lainnya yang diperlukan	Jumlah listing with pengumpul data pemertanian atau penggantian yang diperlukan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	30 Unit	63 Unit	86.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	100 %	160.000.000
6.01.01.2.09.08	Penelitian dan Pengumpulan Bahan MBR Lainnya	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlukan dan ditanggung Kabupaten	Jumlah listing with pengumpul data pemertanian atau penggantian yang diperlukan	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	1 Unit	63 Unit	810.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan pemertanian atau penggantian implektual	100 %	100.000.000
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>PROGRAM PENYELINGGABAHAN PENGEMBANGAN</b>						<b>3.145.000.000</b>		<b>4.252.110.842</b>				
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyempurnaan Program Internal</b>						<b>2.740.000.000</b>		<b>3.952.110.842</b>				
6.01.02.2.01.01	Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Perencanaan penyempurnaan program	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	12 Laporan	61 Laporan	870.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan program	100 %	721.110.842
6.01.02.2.01.02	Pengembangan Kegiatan Pemerintah Daerah	Perencanaan penyempurnaan program	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	16 Laporan	61 Laporan	5.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan program	100 %	3.740.000.000
6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Perencanaan penyempurnaan program	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	42 Laporan	61 Laporan	870.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan program	100 %	465.000.000
6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	Perencanaan penyempurnaan program	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Internal	Kota Dumai, Bukit Kapur, Ragan Besar	100 %	1 Laporan	61 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan penyempurnaan program	100 %	100.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.81.8.06.0.00.01.0000 INSPER/00847  
Sub Unit Organisasi : 6.01.6.00.0.03.01.0000 INSPER/00847

Kode	Uraian/ Bidang Utama/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Maksud Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Kemajuan Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Profilisasi Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Output Program	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Masa Kegiatan				Target Capaian Kinerja		
												Tingkat Uluh	Target	
6.01.02.2.01.01	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Laju-Hal Pemeriksaan RPT di dan Tingkat Laju-Hal Pemeriksaan RPT	Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tingkat Laju-Hal Pemeriksaan RPT di dan Tingkat Laju-Hal Pemeriksaan RPT	Jumlah Laporan Penyenggaraan Pengawasan Internal	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	2 Dokumen	01 Laporan	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	100 %	500.000.000
6.01.02.2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							600.000.000						1.100.000.000
6.01.02.2.01.02	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Negara/ Daerah	Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Penyelidikan Kegiatan Negara/ Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	1 Laporan	01 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	100 %	300.000.000
6.01.02.2.01.03	Pengawasan dengan Tujuan Sektoral	Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Sektoral	Jumlah Laporan Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	10 Laporan	01 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	100 %	400.000.000
6.01.03	<b>PROGRAM PENCANAAN KEBUMAHAN, PICALARANGAN DAN AGT/REHAB</b>							<b>1.350.000.000</b>						<b>2.900.000.000</b>
6.01.03	<b>Perencanaan Subjekan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>							<b>250.000.000</b>						<b>850.000.000</b>
6.01.03.2.01.01	Perencanaan Kegiatan Teknik di Bidang Pengawasan	Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Teknik di Bidang Pengawasan yang Ditinjau	Jumlah rekomendasi kegiatan teknis yang ditinjau	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	1 Rekomendasi	02 Rekomendasi	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	100 %	100.000.000
6.01.03.2.01.02	Perencanaan Kegiatan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan	Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Rekomendasi Kegiatan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan yang ditinjau	Jumlah rekomendasi kegiatan teknis yang ditinjau	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	1 Rekomendasi	02 Rekomendasi	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	100 %	100.000.000
6.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>							<b>1.000.000.000</b>						<b>2.250.000.000</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Usaha Kewirausahaan Daerah	Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Usaha Kewirausahaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	3 perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Bag Hal		Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	100 %	300.000.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan Asistensi Masyarakat dan Pemula Reformasi Birokrasi	Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penyajian Informasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	10 perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	100 %	300.000.000
6.01.03.2.02.03	Keaktifan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pembuktian Kinerja	Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Keaktifan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencapaian dan Pembuktian Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	1 Kegiatan	15 Perangkat Daerah	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	100 %	400.000.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integratif	Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integratif	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Kota Dumai, Bukit Kaput, Bagian Besar	100 %	1 perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bap Hal		Perencanaan perencanaan kegiatan, pendampingan dan asistensi	100 %	400.000.000
								<b>TOTAL</b>						<b>25.457.000.000</b>